

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sektor usaha di Indonesia saat ini didominasi oleh UMKM. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99% dari keseluruhan jumlah unit usaha serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 60,4% dan dapat menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Namun dari data tersebut menunjukkan jumlah usaha dengan skala mikro yang lebih mendominasi yaitu sebesar 98% dari jumlah UMKM (Kemenkeu Republik Indonesia, 2020).

Revolusi industri 4.0 ditandai dengan munculnya sistem jaringan atau revolusi digital terkait dengan aspek digital payment pada tahun 2012. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai mandat serta kewenangan pada sektor pembayaran. Dalam menciptakan sistem pembayaran yang nyaman, efektif dan lancar pada tanggal 14 Agustus 2014, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah mengumumkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan tersebut dilakukan untuk dapat mendorong berfungsinya sistem keuangan nasional di Indonesia yang dapat berjalan secara efektif maupun efisien (Palupi, 2021). Berkaitan dengan program GNNT, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mengeluarkan Inpres No. 10 Tahun 2016, dimana pada salah

satu isinya berisikan arahan untuk percepatan implementasi transaksi non tunai pada seluruh Kementerian atau Lembaga dan Pemda. Dalam hal ini diterbitkan pula Surat Edaran Mendagri No.910/1866/SJ Tahun 2017 mengenai Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap Pemda Provinsi serta Pemda Kabupaten/Kota dengan bertujuan untuk mendorong percepatan elektronifikasi transaksi. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mendorong penggunaan sistem dan instrument pembayaran non tunai sehingga dapat menciptakan cashless society. Fintech juga hadir untuk memberikan kepercayaan kepada penggunanya, adanya transparansi, dan penggunaan teknologi. Perlu diketahui juga bahwa saat ini dunia sedang beralih ke dunia tanpa uang tunai, seiring dengan kemajuan teknologi keuangan yang memiliki implikasi bagi masyarakat secara keseluruhan (Aulia, 2020).

Penggunaan internet yang pesat di Indonesia menjadi bukti konkret betapa teknologi sangat penting dalam mengubah dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali pada bidang ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, mencatat sebanyak 40 lebih perusahaan telah menerbitkan uang elektronik berbasis server. Merujuk kepada hal tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Blueprint Sistem Pembayaran Nasional 2025 sebagai upaya dalam mendukung tantangan ekonomi di era digital. Blueprint tersebut terdiri dari 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 5 inisiatif utama dan diwujudkan ke dalam 23 key deliverables yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2025. Adapun target dari sistem tersebut yaitu membawa masuk 91,3 juta penduduk dewasa unbanked dan 62,9 juta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke dalam ekonomi dan

keuangan formal yang memanfaatkan peluang inovasi digital (Bank Indonesia, 2019).

Meningkatnya pembayaran digital membuat Bank Indonesia berinisiatif meluncurkan teknologi serupa *QR Code* yang disesuaikan dengan standar Indonesia bernama QRIS. Upaya untuk menghindari keribetan diantara dua belah pihak dalam suatu transaksi, QRIS dapat menampung semua *QR Code* di semua aplikasi pembayaran digital. Jika sebelumnya toko atau pedagang harus setidaknya memiliki lima aplikasi pembayaran digital dengan *QR Code*-nya masing – masing. Kini toko atau pedagang hanya perlu satu *QR Code* saja, yaitu QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*) (Riandy, 2023).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah suatu sistem transaksi atas sebuah pembayaran dengan basis *shared delivery channel* yang berguna untuk menstandarisasi transaksi atas pembayaran yang melalui *QR Code*. QRIS adalah standar kode QR nasional yang digunakan untuk pembayaran digital. QRIS dapat digunakan melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet digital, dan mobile banking. Sistem ini dirintis oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sekaligus merupakan bagian dari *Blueprint* Sistem Pembayaran Nasional 2025 (Natalina et al, 2021). Bank Indonesia sudah mencatat penggunaan QRIS pada 5,8 juta merchant yakni naik 88% dari 22 Maret 2020 yang hanya mencatat penggunaan QRIS sebanyak 3,1 juta merchant. Sebagian besar dari merchant tersebut adalah UMKM (Bank Indonesia, 2020). QRIS dalam penerapannya masih terdapat berbagai kendala salah satunya yaitu tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah, terutama pemahaman masyarakat mengenai keuangan digital masih

kurang dan belum merata. Berdasarkan data yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) indeks literasi keuangan dari tahun 2013-2019 selama kurun waktu 6 tahun hanya naik sebesar 16.18%. Menurut data Bank Indonesia pengguna QRIS meningkat pesat, namun ternyata masih banyak *merchant* atau toko yang belum paham dan bahkan tidak mengetahui mengenai QRIS (Palupi, 2022).

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten di Bali dengan jumlah peningkatan UMKM yang drastis. Hal tersebut terlihat dari adanya perkembangan jumlah pelaku UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, perkembangan jumlah UMKM dari tahun 2019-2023 selalu mengalami kenaikan yang cukup drastis. Berikut data mengenai jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng per masing-masing kecamatan dari tahun 2019- 2023 sebagai berikut.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah UMKM Per kecamatan Di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Gerokgak	4.619	4.710	4.994	5.286	5.466
2	Seririt	4.190	4.461	4.502	4.502	4.578
3	BusungBiu	3.687	3.755	3.810	3.853	3.938
4	Banjar	3.490	3.578	3.612	3.649	3.739
5	Sukasada	2.941	3.014	3.073	3.110	3.210
6	Buleleng	6.600	6.836	6.951	7.020	7.397
7	Sawan	3.128	3.158	3.241	3.268	3.378
8	Kubutambahan	2.765	2.823	2.847	2.866	2.991
9	Tejakula	3.132	3.220	3.320	3.420	3.550

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan UMKM

terbanyak ada di Kecamatan Buleleng. Peningkatan jumlah UMKM terbesar di per kecamatan ada di Kabupaten Buleleng, namun kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan kinerja UMKM, khususnya di Kabupaten Buleleng. Permasalahan kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng masih tetap bertahan hingga Tahun 2023 sebagaimana data yang tersaji dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Performa Kinerja UMKM di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Performa Kinerja Lebih Buruk	Persentase Performa Usaha
1	Buleleng	5.231	20,79%
2	Denpasar	4.308	17,12%
3	Gianyar	4.249	16,88%
4	Badung	3.594	14,28%
5	Tabanan	2.511	9,98%
6	Jembrana	2.370	9,42%
7	Bangli	1.222	4,86%
8	Karangasem	1.067	4,24%
9	Klungkung	614	2,44%
Total		25.166	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki tingkat kinerja performa yang buruk yaitu 5.231 atau 20,79%, dimana usaha cenderung *stuck* dan hanya berdiam di tempat selama pelaksanaan usahanya di bandingkan di kabupaten lain. Performa usaha merupakan segala hal terkait peningkatan, penurunan, maupun konstan yang berhubungan dengan perkembangan usaha dari pelaku UMKM.

Tingkat literasi keuangan di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil SNLIK 2019 menunjukkan bahwa Bali memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 38,06%. Tercatat bahwa Kabupaten Badung merupakan

kabupaten dengan tingkat literasi keuangan yang tertinggi, yaitu sebesar 38,23%, sedangkan Kabupaten Gianyar memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 38%, serta Kabupaten Buleleng memiliki tingkat literasi sebesar 32,4%. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah dibandingkan kabupaten lainnya. *Survey* tersebut diambil dari 12.773 responden dari 34 provinsi dan 67 kabupaten dan menunjukkan tingkat literasi keuangan sebesar 38,03% (OJK, 2019).

Perlu adanya peningkatan literasi keuangan di Kabupaten Buleleng, terutama kepada UMKM agar dapat meningkatkan performa kinerja usahanya. *Survey* Bank Indonesia menyatakan bahwa literasi keuangan pada UMKM masih rendah. Literasi keuangan UMKM di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah, yaitu berada di angka 32% pelaku UMKM yang memahami tentang literasi keuangan. Sebesar 68% pelaku usaha UMKM di Kabupaten Buleleng tidak memahami tentang literasi keuangan (Bank Indonesia, 2015).

Menurut OJK (2017b), bahwa literasi keuangan terendah di Kabupaten Buleleng ada pada pelaku usaha mikro yaitu sebesar 23,8%, sedangkan literasi keuangan pelaku usaha kecil sebesar 35,3% dan literasi keuangan pelaku usaha menengah sebesar 44,7%. Dari data tersebut berarti tingkat literasi keuangan pelaku usaha mikro masih jauh dibawah rata-rata literasi keuangan nasional yaitu 38,03% (SNLIK, 2019). Hal tersebut terlihat dari jumlah UMKM yang mengadopsi standar nasional kode respons cepat atau Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada Provinsi Bali didominasi oleh wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar (Wiratmini, 2021).

Tabel 1.3
Persentase *Merchant* yang Mengadopsi QRIS

No	Wilayah	Persentase <i>Merchant</i> yang Mengadopsi QRIS
1	Denpasar	49%
2	Badung	28%
3	Gianyar	8%
4	Buleleng	6%
5	Tabanan	4%
6	Jembrana	2%
7	Klungkung	2%
8	Karangasem	2%
9	Bangli	1%

(Sumber: Wiratmini, 2021)

Berdasarkan tabel 1.3 Kabupaten Buleleng menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki persentase pengadopsian QRIS yang masih rendah di Bali yaitu berada pada angka 6%. Hal ini menjadi salah satu fenomena yang krusial dimana hal yang seharusnya UMKM mulai mengadopsi QRIS secara masif agar dapat mengemangkan usahanya dengan baik. Namun, adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM masih bervariasi, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih memiliki tantangan infrastruktur dan literasi digital. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya untuk mendorong inklusi keuangan digital bagi UMKM, agar mereka dapat beradaptasi dengan tren *cashless society* dan meningkatkan daya saing usaha.

Pantai Penimbangan merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang berada di Kabupaten Buleleng yang cukup terkenal bagi warga Kota Singaraja. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang paling diminati oleh banyak orang baik wisatawan asing maupun domestik, terutama Mahasiswa yang ada di Kota Singaraja. Pedagang di Pantai Penimbangan terus berkembang, karena menjadi tempat *favorite* untuk melihat *sunset* dan harganya yang murah sesuai dengan kantong mahasiswa (Febriana, 2022). Banyaknya jumlah pedagang di Pantai Penimbangan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pantai

Penimbangan. Pantai Penimbangan menjadi pilihan terbaik baik wisatawan asing maupun domestic karena menawarkan pemandangan Pantai yang indah dan penataannya modern. Banyak anak muda yang sering berkumpul di Pantai Penimbangan untuk menikmati Pantai di Kota Singaraja sembari berbelanja di warung yang ada di sekitar Pantai. Meskipun terdapat banyak pedagang di Pantai Penimbangan penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran belum merata di semua pedagang. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dinyatakan bahwa belum seluruh Pedagang di Pantai Penimbangan menggunakan sistem pembayaran digital sebagai sarana transaksi pembayaran. Berikut data disajikan dalam tabel 1.4

Tabel 1.4
Jumlah Pengguna QRIS Pada Pedagang di Pantai Penimbangan

Jumlah Pengguna QRIS Pada Pedagang di Pantai Penimbangan	
Sudah	Belum
43	44

(Sumber: Observasi Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 1.4 terdapat hanya 40 Pedagang di Pantai Penimbangan yang telah mengadopsi pembayaran digital menggunakan sebagai sarana pembayaran. Sebanyak 44 pedagang belum menerapkan transaksi digital menggunakan sistem pembayaran digital sebagai sarana transaksi pembayaran. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti mengenai minat menggunakan QRIS pada pedagang di Pantai Penimbangan sebagai sarana pembayaran diperoleh hasil, yaitu pedagang yang sudah menggunakan QRIS mengatakan bahwa prosedur perolehan *Barcode* QR dikatakan mudah. Mereka memperoleh bantuan pembuatan rekening dari bank BPD Bali dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi digital di Pantai Penimbangan. Perbankan

yang digunakan beragam, ada yang menggunakan Bank BCA, BRI, BNI dan sebagainya. Berkas yang perlu disiapkan oleh pedagang tidaklah banyak, pedagang hanya perlu menyiapkan KTP dan nama warungnya saja. Pedagang yang sudah menggunakan QRIS mengatakan bahwa sistem pembayaran menggunakan QRIS itu memberikan kemudahan dan manfaat bagi pedagang.

Menggunakan QRIS sebagai sarana pembayaran digital memberikan manfaat berupa hasil penjualan pedagang langsung masuk ke rekening pedagang sehingga pedagang sekaligus menabung pada rekening tersebut. Pedagang mengatakan bahwa kebanyakan konsumen memilih warung yang menerapkan sistem pembayaran menggunakan QRIS. Pegawai-pegawai perangkat daerah diharuskan untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS untuk mendukung pembangunan ekonomi digital. Pedagang yang belum menggunakan QRIS sering kehilangan konsumen karena kebanyakan konsumen tidak membawa uang tunai sehingga mereka memilih warung yang menggunakan QRIS. Pelaku usaha yang berada di pinggir pantai yang ada di pantai penimbangan belum memiliki izin dari pemerintah Kabupaten Buleleng, namun mereka masih berada pada naungan desa adat, yaitu Desa Adat Baktiseraga dan Pemaron. Setiap warung yang ada di Pantai Penimbangan tidak perlu memberikan setoran tahunan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan model yang menjelaskan dampak dari variabel-variabel eksternal terhadap kepercayaan internal pribadi dan sikap individu yang kemudian akan berdampak pada minat individu untuk menggunakan suatu teknologi (Davis, 1989). Teori ini digunakan karena adanya faktor-faktor kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan manfaat

(usefulness) mampu untuk memprediksi minat pengguna juga dapat memperkirakan perilaku pengguna dalam menerima suatu teknologi. Dalam penelitian ini adalah perilaku UMKM dalam menerima dan minat menggunakan QRIS sebagai salah satu teknologi dalam pembayaran.

Menurut (Sihaloho dkk., 2020) penggunaan QRIS pada kalangan UMKM mengalami kendala dan ketidakpuasan dalam menggunakan pembayaran ini. Kendala yang dialami salah satunya adalah masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami sistem kerja pembayaran ini. Hal ini didukung dengan penelitian dari (Herlambang, 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap sistem pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS) tidak berpengaruh terhadap pengembangan UMKM Kota Medan. Hal ini membuktikan bahwa sebagian sebesar UMKM masih menganggap menggunakan layanan QRIS akan menambah rumit dan tidak memberi manfaat yang berarti bagi mereka.

Faktor pertama yang mempengaruhi minat menggunakan QRIS adalah *ease of use* atau kemudahan. Adopsi QRIS (Quick Response Indonesian Standard) sebagai alat pembayaran digital pada pedagang sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaannya. Studi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pedagang yang merasa QRIS mudah diakses, dipahami, dan diimplementasikan dalam transaksi sehari-hari cenderung lebih antusias mengadopsinya. Kemudahan integrasi QRIS dengan aplikasi pembayaran digital yang sudah familiar, serta kemudahan pemantauan transaksi dan pengelolaan keuangan, menjadi faktor-faktor yang meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan di kalangan pedagang. Di sisi lain, pedagang yang masih merasakan kerumitan dalam konfigurasi, pengoperasian, atau pelaporan transaksi QRIS cenderung lebih

enggan untuk mengadopsinya. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi digital dan penyederhanaan proses implementasi QRIS menjadi kunci bagi akselerasi adopsi pembayaran digital pada pedagang. Hal ini didukung oleh penelitian Ningsih (2021), Palupi dkk (2022), Agustina & Musmini (2023), dan Sudiatmika & Martini (2022) menyatakan persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan QRIS. Namun dalam penelitian Rahmawati (2023) menyatakan persepsi kemudahan penggunaan tidak terdapat pengaruh terhadap keputusan menggunakan QRIS.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi minat menggunakan QRIS adalah *perceived usefulness* atau persepsi manfaat. Persepsi manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) juga diartikan bahwa jika seseorang merasa sistem tersebut bermanfaat digunakan maka sistem tersebut berguna bagi mereka (Fitriana & Wingdes, 2017). Pedagang yang telah merasakan manfaat dari sistem QRIS bagi usahanya, menumbuhkan keyakinan bahwa sistem itu sangat membantu dalam usaha yang dijalankannya. Semakin sering pengguna mendapatkan manfaat kegunaan sistem layanan maka semakin mendorong tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem layanan, karena dengan banyaknya testimoni yang positif dari pengguna mengenai manfaat yang diterima semakin menambah rasa kepercayaan dalam sistem tersebut (Kurniawan dkk., 2019). Penelitian ini sejalan dengan Ningsih (2021), Nikmah (2023), Mahyuni & Setiawan (2021) menyatakan persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS.

Research GAP dengan penelitian lainnya yaitu masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu, yaitu terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2022) menggunakan variabel literasi keuangan dan kemudahan penggunaan sistem QRIS terhadap keputusan bertransaksi menggunakan QRIS pada UMKM. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan. Tempat penelitiannya pun berbeda, yaitu pada penelitian kali ini dilakukan pada Pedagang di Pantai Penimbangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Manfaat Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Pada Pedagang di Pantai Penimbangan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka dilakukan identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Hanya 43 pedagang saja yang sudah menggunakan QRIS sebagai sarana pembayaran. Penggunaan QRIS pada pedagang di Pantai Penimbangan belum merata pada seluruh pedagang di Pantai Penimbangan.
2. Pedagang di Pantai Penimbangan yang belum menggunakan QRIS sebagai sarana pembayaran sering kehilangan konsumen
3. Kurangnya sosialisasi terkait sistem pembayaran menggunakan QRIS pada pedagang di Pantai Penimbangan.
4. Literasi keuangan pada pedagang di Pantai Penimbangan terhadap penggunaan QRIS masih sangat kurang.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas yaitu penelitian ini hanya membahas terkait variabel kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan terhadap minat menggunakan QRIS pada Pedagang di Pantai Penimbangan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pedagang di Pantai Penimbangan?
2. Bagaimana pengaruh manfaat penggunaan terhadap minat menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pedagang di Pantai Penimbangan?
3. Bagaimana pengaruh kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan secara simultan terhadap minat menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pedagang di Pantai Penimbangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk membuktikan kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada

pedagang di Pantai Penimbangan.

2. Bertujuan untuk membuktikan manfaat berpengaruh terhadap minat menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada pedagang di Pantai Penimbangan
3. Bertujuan untuk membuktikan kemudahan dan manfaat secara simultan berpengaruh terhadap minat menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada pedagang di Pantai Penimbangan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis variabel kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan terhadap minat menggunakan QRIS pada Pedagang di Pantai Penimbangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pedagang untuk memahami terkait minat menggunakan QRIS agar dapat digunakan dengan baik sehingga mendapatkan manfaat yang diharapkan.